

**SINGKRONISASI KEBIJAKAN DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN KUDUS KOTA
PRO INVESTASI**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Magister**

Program Studi Magister Ilmu Hukum



Disusun oleh :

AHMAD TRISWADI, SE, SH

NIM : 2015 – 02 – 002

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2019

TESIS

SINGKRONISASI KEBIJAKAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KUDUS KOTA PRO INVESTASI

Yang disusun oleh :

AHMAD TRISWADI, SE, SH

N I M : 2015 – 02 – 002

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 30 Agustus 2019

Pembimbing Utama



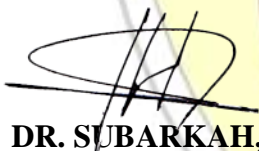
DR. HIDAYATULLAH, SH, MHum

Anggota Dewan Penguji I



DR. SUKRESNO, SH, MHum

Pembimbing Pendamping



DR. SUBARKAH, SH, MHum

Anggota Dewan Penguji II



DR. ISKANDAR WIBOWO, SH, MH

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal 30 Agustus 2019



DR. HIDAYATULLAH, SH, MHum

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD TRISWADI, SE, SH

NIM : 2015 – 02 – 002

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan Tinggi ini

Kudus, 31 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan

AHMAD TRISWADI, SE, SH

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto : Kesabaran, ketelitian, kesungguhan yang tiada henti, disertai dengan suatu keyakinan adalah merupakan kunci keberhasilan.

Rasa bersyukur, rasa bangga, rasa bahagia, rasa puas luar biasa, rasa lelah yang terbayarkan, rasa makin percaya diri, rasa makin dewasa, dan rasa ingin semakin berhati – hati bertumpuk menjadi satu setelah usai menyelesaikan tugas akademik menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus

Orang Jawa berkata :

*Samoe barang opo wae yekti woes kagaris deneng Kang Moerbeng Doemadi.
Kang aran djodo, redjeki, pati, deradjat kelawan pangkat, sakabehe woes dadi
papesthineng Goesti Kang Moho Peparang.
Djedjer manoengso hamoeng sadermo biso angklakoni tan biso agawe pesthi.*

Kupersembahkan untuk :

1. Ayah da Ibu Tercinta : Bapak Mardjono (Alm), Ibu Sulyati ;
2. Isteriku Tercinta : Eti Setiyati ;
3. Putra Putri Tersayang : Samoda Danu Brata, Damila Olindavashti ;
4. Bapak Ibu Dosen Prodi MIH Universitas Muria Kudus ;
5. Saudara serta Handaitolanku ;
6. Almamaterku ;

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Sang Pencipta yang talah senantiasa memberikan petunjuk, kesehatan, kemurahan, serta kemudahan dalam segala urusan, utamanya karunia yang luar biasa dan tidak terhingga yakni akal pikiran yang selalu berkeinginan untuk senantiasa terus belajar, menelaah, menganalisis serta memahami berbagai subyek dan permasalahan, sehingga mampu menyelesaikan Tesis berjudul : SINGKRONISASI KEBIJAKAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KUDUS KOTA PRO INVESTASI.

Dalam proses penyusunan Tesis ini Penulis tidak terlepas dari bantuan serta peran yang sungguh besar dari berbagai pihak. Oleh karenanya Penulis sungguh menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak DR. Hidayatullah, SH, MHum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus sekaligus bertindak sebagai Pembimbing Utama yang telah membimbing secara langsung kepada Penulis sejak persiapan hingga akhir penulisan ;
2. Bapak DR. Subarkah, SH, MHum, selaku Pembimbing Pendamping yang telah membimbing secara langsung kepada Penulis sejak persiapan hingga akhir penulisan ;
3. Bapak DR. Sukresno, SH, MHum, selaku Anggota Dewan Penguji yang telah banyau memberikan petunjuk serta bimbingan hingga terselesaikannya penulisan Tesis ini ;

4. Bapak DR. Iskandar Wibowo, SH, MH, selaku Anggota Dewan Penguji yang telah banyak memberikan petunjuk serta bimbingan hingga terselesaikannya penulisan Tesis ini ;
5. Bapak dan Ibu pimpinan instansi pemerintah dan/ atau swasta terkait yang telah banyak memberikan keterangan, masukan, serta petunjuk kepada Penulis dalam rangka hingga sampai pada tahap penyelesaian Tesis ini ;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus yang telah banyak mencurahkan ilmu kepada Penulis selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan ;
7. Para pihak yang lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak berjasa dalam rangka proses penulisan Tesis ini ;

Semoga bimbingan serta bantuan yang telah diberikan kepada Penulis menjadi amal kebaikan dan senantiasa mendapatkan balasan dari Sang Pencipta. Penulis sangat menyadari bahwa Tesis ini tentu masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya Penulis selalu dan sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak agar didapatkan suatu kemampuan yang semakin bertambah, dan dapat dipergunakan untuk proses penulisan karya ilmiah yang lain di kemudian hari.

Kudus, 31 Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	12
1. Pengertian Penanaman Modal	12
2. Peraturan Perundang – Undangan	24
3. Sistem Hukum	37
a. Aspek Substantif	40
b. Aspek Struktur	42
c. Aspek Kultur	47

4. Singkronisasi/ Harmonisasi Hukum	52
5. Pengertian Penataan Ruang.....	58
6. Progresifitas Hukum.....	66
F. Metode Penelitian	74
1. Pendekatan Masalah.....	74
2. Spesifikasi Penelitian	74
3. Jenis Data	75
4. Metode Pengumpulan Data	76
a. Data Primer	77
b. Data Sekunder	78
c. Data Tersier	79
5. Metode Analisis Data	79
6. Sistematika Penulisan	80
BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
A. Faktor – faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan investasi di Kabupaten Kudus belum maksimal.....	83
1. Singkronisasi kebijakan	87
a. Singkronisasi ketataruangan	88
b. Dominasi sumber lemahnya singkronisasi berada pada peraturan daerah tentang ketataruangan di Kabupaten Kudus	95

c. Peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang	99
2. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus berkenaan pendapatan investasi	100
3. Urgensi sistem zonasi ketataruangan di Kabupaten Kudus	104
 B. Singkronisasi kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus agar mampu mendukung kebijakan yang ramah terhadap investasi	110
1. Pembentukan peraturan perundang – undangan yang proporsiaonal dan procedural	113
2. Peningkatan pertisipasi masyarakat dan penguatan legislasi dalam pembentukan peraturan perundang – undangan yang ideal.....	120
 BAB III PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	126

ABSTRAK

Tesis dengan judul SINGKRONISASI KEBIJAKAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KUDUS KOTA PRO INVESTASI ini secara umum diilhami oleh suatu gejala pada pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Kudus dalam dunia investasi. Situasi dan kondisi yang riil terjadi adalah keberadaan realisasi pendapatan investasi di Kabupaten Kudus tidak maksimal, dan kebijakan ketataruangan yang diterapkan cenderung merugikan kelompok investor atau penanam modal di Kabupaten Kudus. Hal dimaksud menjadi latar belakang Penulis untuk melaksanakan penelitian tentang apa yang sebenarnya terjadi berkenaan dengan permasalahan bersinggungan dengan dunia investasi di Kabupaten Kudus.

Dalam Penelitian ini Penulis membatasi pada 2 (dua) permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu : 1) Mengapa tingkat pendapatan investasi di Kabupaten Kudus belum bisa maksimal ; dan 2) Bagaimana sinkronisasi kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus agar mampu mendukung kebijakan yang ramah terhadap investasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang : 1) Apa saja penyebab tingkat pendapatan investasi di Kabupaten Kudus sehingga belum maksimal ; dan 2) Bagaimana sinkronisasi kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus agar mampu mendukung kebijakan yang ramah terhadap investasi.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *yuridis empiris* dalam spesifikasi *deskriptif analisis*. Mengenai jenis data Penulis menggunakan data *primer*, *sekunder* dan *tersier* dengan sistem pengumpulan data dengan cara *observasi* dan *interview*/ wawancara secara langsung kepada narasumber yang telah ditetapkan sebelumnya, ditambah dengan kegiatan studi pustaka baik terhadap buku – buku literatur maupun peraturan perundang – undangan terkait. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk karya tulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor – faktor yang menyebabkan pendapatan investasi di Kabupaten Kudus belum maksimal adalah : 1) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus yang belum mengarah kepada nilai – nilai sinkronisasi, menjalankan kewenangan berkenaan dengan pendapatan investasi secara minim, dan pemetaan wilayah tentang zonanisasi belum mencerminkan penataan ruang yang baik, dan 2) Sinkronisasi kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus agar mampu mendukung kebijakan yang ramah terhadap investasi adalah : 1) Pembentukan peraturan perundang – undangan yang proporsional dan prosedural, dan peningkatan partisipasi masyarakat serta penguatan legislasi dalam pembentukan peraturan perundang – undangan yang ideal.

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan akhirnya Penulis menyimpulkan bahwa atas terjadinya dissinkronisasi kebijakan dimaksud, ternyata yang paling mendominasi sebagai penyebab adalah kerancuan pada Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032. Sehingga revisi atas regulasi dimaksud yang sekarang sedang berjalan harus dilaksanakan secara sporadis dan *extra* luar biasa.

Kata Kunci : Pendapatan Investasi, Sinkronisasi Kebijakan, Ketataruangan Kabupaten Kudus